

102976

**Sastri Yunizarti Bakry & Media Sandra Kasih (editor). Menelusuri
jejak Melayu-Minangkabau. Padang: Yayasan Citra Budaya
Indonesia, 2002**

MENGGAGAS ZONA EKONOMI DUNIA MELAYU Beberapa Catatan Berdasarkan Telaah Sejarah

Mestika Zed

Dalam risalah terdahulu,¹ telah dikemukakan beberapa argumen pokok saya, antara lain ialah bahwa "Dunia Melayu" merupakan suatu bidang telaah yang layak (*intelligible field*), baik dari segi akademik, maupun praktis. Selanjutnya, jika kita ingin memahami kembali "Dunia Melayu" sebagai suatu kesatuan, yakni sebagai unit kebudayaan (*tamaddun*) Melayu, maka perlu dikaji ulang pelbagai aspek kehidupan yang menjadi ciri khas dan sekaligus merupakan "contour" kebudayaan Melayu secara keseluruhan. Pendekatan diakronis (historis) mengenai "contour" kebudayaan Melayu tersebut, baik kebudayaan materialnya maupun immaterial, baik itu peninggalan arkeologis, maupun ekonomi, sosio-kultural, bahasa dan sastra, ilmu pengetahuan dan lain-lainnya -- akan banyak membantu kita menemukan kontinuitas dan diskontinuitas sejarah ke situasi kekinian kita sekarang.

Pada risalah ini saya secara khusus akan memberikan perhatian kepada aspek-aspek ekonomi "Dunia Melayu" dari sudut telaahan sejarah. Pemahaman kritis tentang basis-basis ekonomi "Dunia Melayu" di masa lalu dapat membantu menjelaskan mengapa gagasan tentang "zona ekonomi" Melayu di masa depan bukanlah hal yang mustahil. Untuk tujuan ini risalah ini akan membatasi pembahasan pada empat pokok pembahasan berikut ini: *Pertama*, membahas apa yang dimaksud dengan "zona ekonomi" Melayu secara umum, kemudian yang *kedua*, mengaitkan konsep zona ekonomi Melayu dalam konteks sejarah empirik di masa lalu. *Ketiga*, mengajukan sebuah observasi umum tentang zona ekonomi Melayu dalam konteks kekinian, khususnya tentang kecen-

¹ Mestika Zed, "Dunia Melayu dan Kebudayaan Melayu dalam Perspektif Sejarah. Suatu Penajakan Awal", *Makalah* untuk Diskusi Panel Praseminar Internasional tentang "Telaah Kritis tentang Kondisi Objektif Kebudayaan Melayu Hari Ini dan Esok", diselenggarakan oleh Gerakan Masyarakat Peduli Kebudayaan Melayu (GMPKM), Padang, 27 Januari 2002.

derungan ekonomi global dewasa ini. Dan akhirnya sebuah catatan penutup, di mana selain, menegaskan kembali apa yang dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, juga akan ditawarkan suatu kerangka kerja awal yang mungkin dapat dikembangkan untuk mewujudkan suatu "zona ekonomi Melayu", baik pada tataran kelembagaan maupun pada tataran kegiatan atau sebagai sebuah gerakan, dengan sekaligus mempertimbangkan kendala-kendala yang akan menghadang di depan.

Tentang Zona Ekonomi "Dunia Melayu"

Konsep zona ekonomi "Dunia Melayu" ialah sebuah konstruksi kerja sama ekonomi khas kelompok masyarakat Melayu yang ditegakkan atas dasar semangat kebersamaan dan kerja sama ekonomi jaringan karena kesamaan-kesamaan kultural dalam arti luas. Sistem ekonomi jaringan yang hendak dibangun dalam zona ini bukan bersifat kapitalistik dan pentolannya, seperti yang ditemukan di Asia Tenggara dalam model AFTA dan sejenisnya, dan juga bukan model pembangunan kawasan dalam satu negara seperti IKT (Indonesia Kawasan Timur) yang dikelola oleh suatu departemen pemerintah. Zona ekonomi "Dunia Melayu" lebih dekat dengan sistem ekonomi jaringan yang berbasis kerakyatan atau ekonomi kerakyatan yang sudah dirasionalisasikan, dengan pengertian bahwa sistem itu lebih berpihak pada kelompok mayoritas ekonomi lemah dan menengah ke bawah. Namun pada saat yang sama juga terbuka untuk membangun "jaringan koperasi dengan koperasi besar berdasarkan keunggulan komperatif yang dimiliki masing-masing kelompok kekuatan ekonomi di "Dunia Melayu."

Basis teoretis konsep zona ekonomi Dunia Melayu lebih dekat dengan pemikiran *Hattanomics*, atau pemikiran ekonomi Mohammad Hatta dengan memperluas cakupan operasionalnya yang menjangkau transnasional, yaitu Dunia Melayu.² Masyarakat "Dunia Melayu", sebagaimana yang telah diutarakan dalam risalah saya yang terdahulu, adalah subyek utama dari kegiatan ekonomi dalam zona ekonomi ini. Mereka kelompok-kelompok masyarakat pendukung kebudayaan (*tamaddun*) Melayu yang meliputi seluruh puak Melayu yang tersebar di sebagian besar negara-negara Asia Tenggara, seperti sebagian di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand (lihat peta). Sebagian besar kondisi

² Tentang "Hattanomics" telah dikemukakan dalam tulisan saya *Cara baik Bung Hatta* (in print. Bung Hatta University Press, 2002).

ekonomi mereka (tentu dengan beberapa pengecualian) sangat menyedihkan. Mereka umumnya masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup secukupnya (ekonomi subsistensi), terutama dalam sektor agraris, nelayan, pekerja kasar dan hanya sebagian kecil yang sudah masuk menjadi pelaku dunia usaha padat modal. Data konkret mengenai sifat, kelompok dan bidang kegiatan ekonomi mereka ini masih memerlukan riset selanjutnya. Sekedar gambaran partial dari kenyataan ini data Biro Statistik Nasional (BPS) tahun 1999 menunjukkan bahwa dari 39,8 juta pengusaha di Indonesia, 99,8% di antaranya adalah pengusaha kecil dan hanya 0,2% pengusaha besar dan menengah dan itu mayoritas dari kelompok Cina. Dari 39,8 juta pengusaha di atas 62,7% bergerak dalam sektor agraris. Keadaan ini tentu belum menggambarkan realitas ekonomi Melayu secara keseluruhan. Namun secara gamblang kondisi ini mencerminkan suatu sisi yang sangat tidak menggembirakan dalam sektor perdagangan, sementara dunia pertanian dan kaum tani masih perlu dikaji ulang lagi. Sesungguhnya mereka inilah yang menjadi sasaran dan sekaligus pelaku utama dalam zona ekonomi "Dunia Melayu" nantinya.

Dalam semua mata-rantai zona ekonomi "Dunia Melayu", perguruan tinggi dan pelaku bisnis Melayu menjadi *stakeholders* utamanya. Riset-riset dan pengembangan harus dilakukan secara terus menerus dengan agenda dan fokus yang terintegrasi satu sama lain. Dalam hubungan ini, paling tidak, ada empat faktor utama yang perlu menjadi tumpuan perhatian untuk menilai aset atau kekayaan internal puak Melayu secara struktural, dalam arti semuanya harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Keempat faktor utama itu adalah sebagai berikut:

1. Modal fisik – yaitu nilai dari tanah, air, bahan-bahan mineral, hutan dan sumber daya alam lainnya;
2. Modal Teknologi – yaitu nilai dari mesin-mesin, bangunan-bangunan dan pekerjaan umum serta infrastruktur lainnya;
3. Modal Manusia – yaitu nilai kultural dan nilai produktif penduduk;
4. Modal sosial – yaitu nilai keluarga, komunitas dan berbagai organisasi yang menyatukan masyarakat Melayu secara keseluruhan.

Perlu ditandaskan di sini, bahwa urutan keempat faktor di atas sedikit banyak mencerminkan segi pentingnya dari sudut sejarah, dalam arti justeru karena faktor kekayaan alamnya itulah kawasan ini mengundang daya tarik asing sejak zaman kuno hingga sekarang. Mula-mula

mereka datang untuk berdagang, lalu menjajah negeri Melayu. Orang Melayu kemudian terpecah-pecah ke dalam negara-negara bangsa yang modern. Sejak itu "Dunia Melayu" hilang dari peta modern. Pengkajian sejarah yang lebih mendalam tentang keempat faktor di atas akan membantu menjelaskan bahwa pembentukan "zona ekonomi Melayu" bukanlah hal yang mustahil.

Ekonomi "Dunia Melayu" di Masa Lalu

Kawasan yang kini bernama Asia Tenggara sejak lama telah memainkan peran utama dalam perekonomian dunia. Bukan saja karena diuntungkan oleh letak geografisnya yang menghubungkan dua peradaban besar: Cina, India dan Islam di Timur Tengah, melainkan juga karena daya tarik kekayaan alamnya: emas, lada, rempah-rempah, kapur barus, kayu cendana dan hasil-hasil hutan tropis lainnya. Perdagangan internasional selalu merupakan faktor utama dalam sejarah Asia Tenggara, terutama dalam perdagangan jalur maritim di antara Cina dan India sampai ke Laut Tengah.

Istilah Asia Tenggara itu sendiri baru diperkenalkan oleh orang Eropa sejak PD II. Sebelum tahun 1940-an, mereka menyebut kawasan ini dengan istilah "*Further India*" ("India Belakang"), "*the Far Eastern Tropics*" (Tropika Timur Jauh") dan kadang-kadang "Indo-China". Nama-nama ini jelas dilihat dariacamata Eropa. Kadang-kadang ditemukan juga istilah "*Malay Archipelago*" ("Kepulauan Melayu"), termasuk di antaranya "Semenanjung Melayu" ("*Malay Peninsula*"). Ini agak aneh juga, sebab bukankah sebagian besar kawasan Asia Tenggara terdiri dari gugus kepulauan, yang umumnya berada di bawah pengaruh kebudayaan Melayu. Namun dalam peta modern "Dunia Melayu" tenggelam dalam kawasan Asia Tenggara, bersamaan dengan munculnya negara-negara baru yang kini berhimpun di bawah ASEAN.

Sebelum kedatangan bangsa Barat, kawasan ini dalam sumber-sumber Cina disebut *Nan-Yang* ("Negeri di bawah Angin") atau kadang-kadang "*Mo-lo-yeou*" (Melayu) atau Bumi Melayu. Kerajaan Melayu pertama, yaitu kerajaan maritim Sriwijaya (abad ke-7-13M) menjadi pusat peradaban Hindu-Budha, kemudian yang kedua kerajaan Islam Malaka (abad ke-15-16). Puncak kurun niaga (*the age of commerce*) Asia Tenggara, menurut sejarawan Anthony Reid, berlangsung bersamaan dengan kebangkitan Malaka sebagai pusat niaga terpenting di dunia. Bahasa Melayu menjadi bahasa *lingua franca*, baik dalam transaksi perdagangan

maupun dalam komunikasi politik. Uang dan nila tukar utama ialah emas, umumnya berasal dari Minangkabau dengan berbagai ukuran (*tail*, *gobang*), sedang *picis* dan *peso* masing-masing diimpor dari Cina dan Portugal. Pembesar kerajaan, penguasa pelabuhan (syahbandar) dan "orang kaya" menjadi pemain utama dalam jaringan perdagangan global ini.

Era kesejahteraan yang berlangsung selama lebih kurang dua abad itu sejalan dengan berkembangnya agama Islam dan karya-karya pemikir Islam. Tingkat teknologi orang Eropa tidak lebih maju dari orang Melayu Islam pada masa ini. Orang Melayu, misalnya, tidak ketinggalan dalam teknik pembuatan kapal, alat tulis dan alat-alat pertanian. Namun kemerosotan masa kejayaan Malaka mulai terjadi ketika "krisis abad ke-17", yang disebabkan oleh alasan yang sekarang tidak terlalu aneh: penerobosan hegemoni Barat yang lebih unggul teknologinya, terutama sejak penemuan-penemuan baru abad ke-17 dan revolusi industri abad berikutnya, khususnya dengan ditemukannya kapal uap. Suatu faktor lain yang perlu diperhitungkan dalam hubungan ini ialah peran sentral kelompok etnik Cina sebagai pedagang perantara di dunia Melayu.

Namun pukulan pertama datang dari kekuatan kapitalisme VOC yang didukung oleh penguasa di negeri asalnya, Belanda. Sejak itu "Dunia Melayu" tenggelam dalam peta modern Eropa. Malaka, pusat *tamaddun* Melayu dan sekaligus pusat perdagangan terbesar di Timur itu telah berubah menjadi tempat "orang-orang sial", demikian sebuah sumber mencatatnya. Dengan monopoli, VOC mendesak para pedagang bumiputra ke sektor pertanian dan raja-raja dipaksa meneken kontrak pengakuan kesediaan pengurangan kekuasaan mereka dan akhirnya benar-benar hilang sama sekali setelah kolonialisme abad ke-19.

Jika kita menelaah kembali perubahan-perubahan yang terjadi di Asia Tenggara dari masa jayanya pada abad ke-15 dan ke-16 ke kemerosotannya pada abad-abad berikutnya, maka banyak hal yang harus dikaji ulang. Namun demikian, teori ekonomi dualistik J.H. Boeke agaknya membantu menjelaskan kelemahan utamanya pada modal sosial. Orang Melayu tidak mengenal pemisahan antara nilai sosial dan ekonomi dan bagi mereka kekayaan lebih bernilai sosial ketimbang ekonomis, dalam arti mereka tidak terlalu mementingkan keuntungan maksimal. Karena itu pula, maka mereka kurang memiliki daya saing, kurang berani membuat perhitungan, di samping tidak berminat mengalihkan aset material menjadi investasi atau "modal terpasang" (*fixed capital*), seperti

bangunan, kapal atau komoditi atau mesin. Bagi mereka lebih baik harta atau barang berharga disimpan sendiri, sehingga mudah dibawa jika harus melarikan diri. Namun kondisi ini agaknya juga berkaitan dengan sistem politik yang kurang menjamin stabilitas keamanan. Lebih-lebih lagi karena krisis-krisis pangan yang berkepanjangan, yang ditimbulkan akibat peperangan kronis dan konflik-konflik sosial yang dipicu oleh kemajemukan etnik dan keberagaman kepentingan. James Scott dalam bukunya tentang *Moral Ekonomi Petani di Asia Tenggara* (1985) yang *notabene* berpenduduk mayoritas puak Melayu telah menunjukkan kecenderungan ini, suatu krisis pangan susul menyusul dengan krisis politik, sehingga mendesak kondisi ekonomi petani ke ambang batas krisis subsistensi.

Perubahan-perubahan drastis setelah PD II membawa pengaruh yang amat besar terhadap keutuhan dunia Melayu, khususnya dengan lahirnya negara-negara baru selepas perang. Nasionalisme yang berpusat kepada sentimen politik yang berpusat pada pembentukan negara-negara nasional menggantikan sentimen kebangsaan yang bercorak kultural. Kecenderungan ini bukan tidak membawa pengaruh yang hebat terhadap jaringan-jaringan ekonomi dunia Melayu di masa lalu. Lebih-lebih lagi setelah masuknya kekuatan ekonomi baru, yaitu kapitalisme global yang melanda negeri-negeri yang kini lebih dikenal sebagai kawasan Asia Tenggara ketimbang Melayu.

Zona Ekonomi Melayu dalam Konteks Masa Kini

Dewasa ini terdapat lebih seratus blok ekonomi regional yang didirikan untuk tujuan-tujuan "kerjasama" ekonomi antar-negara di dunia. Blok-blok ekonomi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk proteksionisme. Salah satu pendorong utama gerakan blok ekonomi ini ialah perkembangan industri dan perdagangan internasional di negara-negara maju setelah Perang Dunia II dan semakin menjamur sejak 1980-an. Blok-blok ekonomi ini pada gilirannya mendorong terciptanya persaingan pasar yang benar-benar *global* – yakni suatu sistem yang saling tergantung dalam perdagangan, penanaman modal dan pembangunan, yang menghubungkan hampir semua kawasan di planet bumi ini. Aturan permainannya secara khusus ditetapkan dan diubah oleh negosiasi-negosiasi bilateral dan multilateral dan persetujuan-persetujuan antara perusahaan-perusahaan, industri-industri, negara-negara dan kawasan regional tertentu.

Pemain utama dari ekonomi global ini ialah apa yang boleh disebut tiga versi "tiga serangkai" – Amerika Serikat, Eropa dan Jepang; masing masing membangun lagi kerja sama regional dengan belahan dunia lain. Di luar "tiga serangkai" terdapat versi lanjutan yang bersifat khas, seperti Asia Timur, Amerika Latin dan Asia Tenggara dan bangsa-bangsa lain seperti di Afrika, Timur Tengah dan seterusnya. Ekonomi global yang dibangun atas dasar kerja sama ekonomi antara berbagai blok ekonomi di dunia, pada dasarnya berwatak kapitalis, meskipun dewasa ini konsep kapitalisme yang monolitik hampir tidak pernah ada lagi atau lebih baik disebut "kapitalisme campuran" atau kalau mau apa yang pernah disebut oleh seorang penulis dengan istilah "kapitalisme semu".

Dalam rangka ekonomi global inilah, misalnya, ditetapkan liberalisasi dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang pada umumnya diterapkan atas negara yang paling diuntungkan (*most-favored nation*, MFN). Blok-blok ekonomi yang tergabung dalam GATT secara eksplisit mendiskriminasikan bagian dunia di luar mereka dengan menerapkan pengaturan dagang preferensi kepada negara-negara anggotanya. Teoretis, liberalisasi perdagangan dalam konsep kapitalistik bertujuan untuk mengurangi ongkos transaksi dan hambatan-hambatan yang berhubungan dengan perdagangan, dan karena itu pada saat yang sama mendorong berkembangnya spesialisasi intra-dan inter-industri di negara-negara blok ekonomi tersebut. Skala perekonomian yang dihasilkan selanjutnya mendorong efisiensi industri dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungan ini, blok perdagangan inter-regional yang bertambah dengan pembentukan zona perdagangan baru, berperan sebagai substitusi impor-ekspor ke negara ketiga (yakni negara di luar blok ekonomi tertentu, yang dialihkan atau dibuat tergantung jaringan perdagangannya berdasarkan preferensi blok yang lebih kuat).

Dalam hubungan ini penting untuk dicatat perkembangan baru dalam blok kerja sama ekonomi regional Uni Eropa (MEE), yang memperkenalkan mata uang baru, *Euro* di lingkungan negara-negara anggotanya sejak awal tahun 2002 ini. Meskipun masih dalam taraf percobaan, dan belum tampak pengaruhnya, peredaran *Euro* cepat atau lambat akan berdampak luas terhadap konstelasi perdagangan internasional. Paling tidak, kehadiran *Euro* semakin mengukuhkan dominasi negara "tiga serangkai" dalam moneter internasional. Kalau sebelumnya *nilai tukar* standar dalam transaksi internasional terutama mengacu pada dolar

Amerika (US\$) dan "Yen" Jepang), kini ditambah satu lagi dengan *Euro*. Dengan demikian, maka semakin lengkaplah "tiga serangkai" raksasa ekonomi global menguasai moneter internasional.

Hampir dapat dipastikan, bahwa blok-blok ekonomi di luar pemain utama itu akan menghadapi tantangan yang lebih berat dan mungkin akan semakin tercecer, kalau tidak menyiasati perkembangan ini dengan cepat dan jitu. Ini tentu terkait erat dengan negara-negara miskin di Asia dan Afrika, termasuk di Asia Tenggara. Memang, di Asia Tenggara khususnya telah didirikan sejumlah kerja sama regional dalam berbagai bidang lewat organisasi ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) sejak didirikan tahun 1967. Paling utama dan relatif baru ialah AFTA (*Association of Southeast Asian Nations Free Trade Area*) yang didirikan tahun 1993 dan direncanakan berlaku tahun 2003. Secara historis AFTA merupakan bagian dari kerja sama yang lebih luas dengan dua dari "tiga negara serangkai" (Jepang dan Amerika Serikat). Dalam konstelasi kerja sama ekonomi regional ini, posisi Indonesia paling kritis. Gerakan reformasi, yang tadinya dimaksudkan sebagai antitesis terhadap pengalaman buruk selama Orde Baru, gagal menunaikan misinya, sehingga Indonesia dewasa ini menjadi semakin terpuruk ke titik nadir yang belum pernah dialami sebelumnya. Rangkaian krisis berkepanjangan yang dihadapi Indonesia sampai hari ini, tidak hanya membuat anak-bangsa terantuk-antuk, seperti yang tampak dari konflik-konflik elit politik, konflik agama dan etnik di berbagai daerah, tetapi sekaligus menimbulkan instabilitas dan ketidakamanan, sehingga negeri ini menjadi semacam *State of Fear* ("Negara Menakutkan") bagi negara luar.

Tidak ada yang bisa menyangkal, bahwa krisis politik dan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia, juga terkait erat dengan ekonomi global, yang di satu pihak membuat semakin terbukanya peluang-peluang kerja sama ekonomi dan kolaborasi internasional, di lain pihak menciptakan persaingan dan konflik. Kesalingtergantungan global makin menghasilkan aliansi-aliansi *ad hoc*. Jadi, sesuai dengan sifatnya, ekonomi global yang berwatak kapitalistik menganut sistem persaingan bebas: siapa kuat siapa di atas. Semua ini hanya menguntungkan sekelompok orang kaya yang kuat dan kuasa dan sebaliknya menjadikan kelompok mayoritas yang lemah menjadi mangsa. Dalam hubungan inilah kiranya pentingnya menggagas prakarsa pembentukan zona ekonomi "Dunia Melayu."

Catatan Penutup.

Zona ekonomi Melayu adalah suatu unit ekonomi jaringan antar-kawasan Dunia Melayu berbasis kebersamaan dan kesamaan kondisi-kondisi sosio-kultural dan ekonomi masyarakat Melayu. Pemain utamanya ialah masyarakat Melayu itu sendiri dalam pelbagai tingkat dan bentuk kegiatan ekonomi yang secara bersama-sama membangun sebuah gerakan ekonomi untuk mengangkat kesejahteraan sosial-ekonomi "bangsa" Melayu. Konsep "bangsa" di sini bukan dalam arti politik, melainkan kultural. Karena itu ia dapat melampaui batas-batas negara nasional yang ada di Dunia Melayu, yaitu kawasan yang mencakup sebagian besar wilayah Asia Tenggara dewasa ini.

Bagaimana "zona ekonomi Melayu" ini dibangun? Dalam serba keterbatasan ruang, kesempatan dan pengetahuan kami, kiranya tidaklah mungkin di sini untuk mengemukakan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya. Kami sendiri belum memiliki saran yang konkret mengenai ini. Pada bagian penutup ini kami ingin mengemukakan beberapa catatan rekomendasi sebagai berikut. *Pertama*, pembentukan basis kelembagaan "zona ekonomi Melayu", baik lembaga akademik maupun lembaga ekonomi pendukung kegiatan terkait. Sementara menunggu pembentukan basis kelembagaan formalnya, kegiatan ini diharapkan bisa masuk pada lembaga-lembaga yang telah ada, yang diperkirakan bisa merekomendasikan dan mengembangkan gagasan ini. Kegiatan akademik bisa mulai dengan riset *data base*, dan pengembangan gagasan teoretis-metodologis zona ekonomi Melayu. Sementara kegiatan ekonominya bisa dimulai dengan penataan kelembagaan yang ada dalam rangka gerakan ekonomi Melayu yang bersifat sentrifugal dari sebuah titik kegiatan tertentu nantinya. Dalam hal ini khususnya gerakan mencintai "produksi sendiri" dari orang Melayu, yang tentu akan diiringi dengan kegiatan advokasi melindungi dan memajukan ekonomi orang Melayu dalam arti luas.

Kedua, langkah awal, yang cukup masuk akal dalam gerakan zona ekonomi Melayu ini agaknya bisa dimulai dengan melakukan *joint-research* antara Negeri Sembilan (Malaysia) dengan Sumatera, khususnya Sumatera Barat karena kedua negeri ini memiliki ikatan sejarah yang cukup panjang dan relatif terpelihara. Kesamaan nama-nama nagari di kedua negeri ini bisa dikembangkan dalam bentuk hubungan nagari ke nagari (*village to village – V-to-V*) dan bukan *government to government*

(G-to-G). Ini bisa dimulai dengan melakukan kunjungan silaturahmi guna membuka kerja sama, baik dalam riset atau kerja sama ekonomi dan lain-lain yang bersifat simbiosis-mutualistik. *Ketiga*, penjajakan ekonomi jaringan dalam zona ekonomi Melayu sangat mungkin dirintis atas dukungan dunia usaha dan pemerintah dengan membentuk lembaga *semi-official* yang berpusat di Malaka dan jaringannya ke seluruh Dunia Melayu. Gagasan terakhir ini selanjutnya akan membawa kita kepada butir berikutnya.

Ketiga,antisipasi terhadap kendala-kendala yang akan menghadang di depan. Jika lembaga *semi-official* diharapkan dapat membantu mempermudah mengatasi kendala-kendala birokratis, lembaga riset dan pengembangan (R&D) berkerja untuk mengagendakan kegiatan-kegiatan yang lebih sistemik dalam pengembangan jangka panjang. Dalam hal ini termasuk untuk mengantisipasi kendala yang muncul dari tekanan globalisasi. Globalisasi adalah sebuah kenyataan. Globalisasi ekonomi dewasa ini, paling tidak, telah mendorong tiga hal: internasionalisasi komoditas, transnasionalisasi kapital dan globalisasi informasi. Boleh dikatakan dalam ketiga matra ekonomi global di atas, posisi orang Melayu sangat marginal dan bahkan lebih tepat dikatakan sebagai "obyek" ketimbang subyek. Masuk ke dalam ketiga matra di atas, bukanlah merupakan alternatif yang menjanjikan karena dapat dipastikan kalah dalam persaingan dalam segala lapangan. Ekonomi jaringan dalam zona ekonomi Melayu sebagai antitesa dari paradigma ekonomi kapitalisme global atau ekonomi konglomerat yang berbasis kekuatan modal dan persaingan bebas, tidak mungkin "dilawan" atau "diikuti" dalam rangka "mengejar ketertinggalan". Karena itu harus dicari jalan lain dengan tidak perlu menempatkan diri pada posisi "oposisi" dan juga bukan pada posisi "subordinasi". Apakah semua ini mungkin? Jawabannya terletak pada tanggapan konstruktif yang diberikan terhadap gagasan ini, baik pada tingkat wacana maupun tindakan nyata. Sekian dan terima kasih (Pusat Kajian Sosial-Budaya dan Ekonomi, Universitas Negeri Padang) ***

Kepustakaan Pendukung

- Andaya, L.Y., "De VOC en Laleise Werold in de 17de en 18de Eeuw", dalam M.A.P. Meilink-Roelofs (ed.), *De V.O.C. in Azië*. Bossum: Fibula- Van Dishoeck, 1976.
- Isard, Walter, *Introduction to Regional Science*. Englewood, N.Y. Prentice Hall, Inc., 1975.
- Kotler, Philip, Somkid Jatusripitak, Suvit Maesincee. *Pemasaran Keunggulan Bangsa*. Terj. Jakarta: Penerbit PT Prenhallindo, 1998.
- Lefwich, Richard and Ansel M. Sharp, *Economics of Social Issues*. Plano, Texas: Business Publications, Inc., Sixth Edition, 1984.
- Popkin, Sameol L. *The Rational Peasants: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press, 1979.
- Reid, Anthony, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid I: Tanah Di bawah Angin*. Terjemahan Jakarta: Yayasan Obor, 1992.
- Reid, Anthony, *Dari Ekspansi hingga Krisis. Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680*. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor, 1999.
- Reid, "Southeast Asian Cities before Colonialism", *Hemisphere*, III, No. 29 (1983), hal. 144-149.
- Scott, James, *Senjata Orang-Orang yang Kalah*. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor, 2000.
- Scott, James, *oral Ekonomi Petani*. Terjemahan. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Simkim, C.G.F. *The Traditional Trade of Asia*. London: Oxford University, 1968.
- Taufik Abdullah (ed.). *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi. Jakarta* LP3ES, 1982.

Teichgraeber, Richard F. III, *Free Trade and Moral Philosophy. Rethinking the Sources of Adam Smith's Wealth of Nations.* Durham: Duke University Press, 1986.

Thant, Myo, Min Tang and Hiroshi Kakazu (eds.), *Growth Triangle in Asia. A New Approach to Regional Economic Cooperation.* Oxford: Oxford Univ. Press, 1994.